

***PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (JUDI SLOT)
DIKOTA TALUK KUANTAN***

***LAW ENFORCEMENT IN ERADICING THE CRIME
OF ONLINE GAMBLING (SLOT GAMBLING) IN
TALUK KUANTAN CITY***

**Rara Zui Andri, Riska Sahfitri Normalina S, Suci Ramadani,
Tengku Arif Hidayat**

Fakultas Hukum Universitas Riau

Korespondensi Penulis : riskasahfitri2@gmail.com

Citation Structure Recommendation:

Nama Dibalik. *Judul*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.X. No.X (XXXX).
(untuk bagian sitasi ini tidak perlu diubah, akan diisi oleh editorial)

ABSTRAK

Penelitian empiris adalah metode penelitian yang digunakan. Sumber data primer dan sekunder membentuk sumber data penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan penegak hukum dalam menghilangkan perjudian online ilegal (judi slot) di Kuantan Singingi? dan apa hambatan untuk upaya penegakan hukum untuk menghancurkan perjudian on-line ilegal (judi slot). Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegak Hukum menggunakan upaya kriminal untuk memusnahkan perjudian online ilegal (juga dikenal sebagai "judi slot") di Kuantan Singingi setelah kejahatan dilakukan di bawah kode kriminal. Terdapat tantangan yang dihadapi penegak hukum Kuantan Singingi dalam upaya mereka untuk menghancurkan perjudian internet ilegal (judi slot).

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Judi.

ABSTRACT

Empirical research is the research method used. Primary and secondary data sources form research data sources. The formulation of the problem in this research is what are the actions of law enforcement in eliminating illegal online gambling (slot gambling) in Kuantan Singingi? and what are the obstacles to law enforcement efforts to crush illegal on-line gambling (slot gambling). Research findings show that Law enforcement used criminal efforts to eradicate illegal online gambling (also known as "slot gambling") in Kuantan Singingi after crimes were committed under the criminal code. There are challenges facing Kuantan Singingi Regency law enforcement in their efforts to crush illegal internet gambling (slot gambling).

Keywords: Law Enforcement, Crime, Gambling.

A. PENDAHULUAN

Inisiatif pengembangan dan reformasi hukum harus dilakukan secara terfokus dan terkoordinasi. Untuk memfasilitasi pengembangan dalam berbagai disiplin ilmu sesuai dengan tuntutan pengembangan, kesadaran hukum, dan opini publik tentang penilaian perilaku, sangat penting bahwa bidang hukum dikodifikasi, disatukan, dan bahwa undang-undang disiapkan. Hukum pidana sering digunakan untuk menangani isu-isu sosial, khususnya kejahatan.¹

Khususnya, masalah perjudian sebagai penyakit sosial atau patologi sosial.² implementasi tersebut. Undang-undang yang menargetkan perjudian sebagai aktivitas deviant harus diperbarui. Ini memiliki makna yang sempurna. Karena perjudian menimbulkan risiko nyata terhadap standar sosial, itu dapat menyebabkan konflik pada tingkat pribadi dan masyarakat. Penyakit sosial yang terkait dengan perjudian ini tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi; khususnya, kejahatan siber, atau perjudian melalui sumber daya online, adalah salah satu aspek dari hal ini.

Kejahatan siber, menurut Abdul Wahid dan Mohammad Labib, adalah kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi tanpa batasan. Ini ditandai dengan fitur teknik teknologi yang signifikan yang tergantung pada keamanan dan keandalan informasi yang diakses dan ditransmisikan oleh pengguna internet.³ Berdasarkan banyak definisi, kejahatan siber didefinisikan sebagai aktivitas ilegal apa pun yang dilakukan atas biaya pihak ketiga, menggunakan komputer sebagai alat atau sebagai objek, dengan niat untuk menghasilkan uang. Secara singkat, kejahatan siber adalah setiap perilaku ilegal yang dilakukan dengan teknologi komputer canggih.

Jika undang-undang nasional adalah satu-satunya yang diterapkan, mungkin sulit untuk menghukum cyberbullying sebagai pelanggaran hukum di tempat-tempat seperti ruang siber. Ini karena penjahat hanya dapat memindahkan

¹ Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung 2005, hal. 58

² Kartini Katono, Patologi Sosial, Jilid I, PT. Raja Grafi Persada, Jakarta, 2005, halm. 57

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan, Mayantara (Cybercrime), Refika Aditama, 2005, hlm. 24-25

permainan perjudian mereka menggunakan komputer dan internet, membuat adegan kejahatan tidak jelas. perjudian tidak terbatas pada perjudian; itu juga berfungsi sebagai katalis untuk tindakan kriminal.

Ilegal dan narkoba, antara lain. Kepulauan Cayman, misalnya, adalah tempat pencucian uang dan surga pajak di mana keuntungan dari kegiatan kasino dapat dipulangkan. Penjahat sering menggunakan Indonesia sebagai lokasi untuk operasi pencucian uang yang melibatkan kejahatan internasional skala besar.

Poker adalah salah satu jenis permainan yang saat ini sangat disukai di banyak sektor yang berbeda. Untuk menggunakan mekanisme ini, pelanggar harus terlebih dahulu mendaftar untuk akun di salah satu situs perjudian online dan memberikan informasi identitas tentang diri mereka sendiri. Akun ini membutuhkan nama pengguna dan password. Pelanggar kemudian dapat menyetor setidaknya IDR 50.000 ke akun bookie yang tidak diketahui, yang lokasi dan identitasnya tidak diketahui. Penjahat dapat bermain poker online setelah menerima kutipan transfer dari bank. Hadiah dari permainan perjudian online akan segera dikreditkan ke akun palaku jika mereka muncul menang. Sebaliknya, dana yang ditransfer akan hilang jika penjahat kehilangan permainan.

Perjudian memiliki potensi untuk menghambat aspek moneter dan spiritual pembangunan negara.⁴ Perjudian menciptakan kebiasaan yang lambat dan mengajarkan orang bagaimana membuat hidup yang buruk. Sementara itu, orang-orang dengan etika kerja dan pola pikir yang kuat dibutuhkan untuk kemajuan. Lingkungan yang mendukung dalam segala hal - termasuk yang legal - diperlukan untuk mencapai tujuan bangsa yang kaya, adil, dan makmur. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan sosial dalam bentuk program perlindungan sosial dan kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan rakyat.

B. PEMBAHASAN

Dalam permainan perjudian, pemain menempatkan taruhan untuk memilih satu opsi dari berbagai pilihan, dengan tujuan menjadi satu-satunya yang memilih

⁴ B.Simanjuntak, Pengantar
, Tarsito, Bandung, 1980, hlm.352-353

Rara Zui Andri, dkk.

Judul Naskah Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (Judi Slot) di Kota Taluk Kuantan

dengan benar dan menang. Yang kalah dari taruhan akan mentransfer taruhan ke pemenang. Sebelum pertandingan dimulai, aturan dan jumlah taruhan ditentukan. Perjudian didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai permainan apa pun (seperti bermain kartu atau dadu) di mana taruhan dibuat dengan uang atau barang berharga. Perjudian online, di sisi lain, hanyalah perjudian melalui media elektronik dengan koneksi internet yang bertindak sebagai perantara. "Apa yang disebut permainan perjudian adalah permainan apa pun, di mana secara umum kemungkinan menghasilkan keuntungan tergantung sepenuhnya pada keberuntungan, juga karena pemain lebih terampil atau terlatih," menurut Pasal 303 (3) dari Kode Kriminal. Ini mencakup semua pedoman untuk kompetisi dan pilihan permainan. hal-hal tambahan yang tidak dibahas antara peserta dalam permainan atau kompetisi, di samping semua aturan lainnya.

Definisi perjudian online, menurut penjelasan di atas, adalah permainan apa pun yang dimainkan dengan uang sungguhan sebagai taruhan, dengan kondisi permainan dan jumlah taruhan yang ditentukan oleh penjudi online, dan menggunakan media elektronik dan koneksi internet sebagai perantara. Dulu hanya kecanduan gula, perjudian online telah menjadi bentuk ketergantungan. Jika Anda mencoba dan berhasil, itu akan memicu minat Anda untuk mencoba lagi dengan taruhan yang lebih besar, percaya bahwa semakin banyak uang yang Anda bertaruh, semakin banyak hasil yang akan Anda dapatkan.

Selama pemain memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang di rekening tabungan mereka untuk digunakan sebagai taruhan, komputer, smartphone, dan koneksi internet untuk memfasilitasi perjudian online mereka, mereka dapat terlibat dalam perjudian on-line di mana saja, kapan saja.

1. Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi

Kuantan Singingi berjuang melawan kejahatan perjudian online. Dalam masyarakat Indonesia, perjudian adalah kebiasaan yang menyebar dari kota ke desa. Setiap permainan dapat digunakan sebagai perjudian atau perjudian karena perjudian pada dasarnya adalah perjudian. Pada tingkat yang lebih tinggi,

perjudian direncanakan dan dilakukan dalam kelompok.

Jaringan internet memungkinkan perjudian online, menghilangkan kebutuhan untuk pertemuan fisik. Harus ada upaya untuk mengurangi insiden perjudian online ilegal untuk menghentikan aktivitas kriminal ini dari tumbuh. Kejahatan perjudian online tidak ada di bawah yurisdiksi polisi Kuansing. Sementara itu, informasi survei langsung dari mereka yang melakukan kejahatan perjudian online menunjukkan bahwa kejahatannya telah menjadi penyakit sosial. Hal pertama yang muncul di pikiran adalah apa yang akan menjadi hambatan terbesar bagi Kepolisian Kuantan Singingi District Resort untuk menegakkan hukum tentang kejahatan yang melibatkan perjudian internet? Tiga puluh satu orang di daerah Kuansing diketahui sebagai penjudi online, menurut informasi yang dikumpulkan oleh penulis melalui kuesioner.

Jelas bahwa permainan kartu, yang dimainkan oleh 17 orang atau 54,8% dari semua penjudi online, adalah jenis perjudian yang paling populer. Selain itu, 12 orang, atau 38,7%, terlibat dalam perjudian internet yang terkait dengan sepak bola. 6,4% dari populasi, atau 2 orang, bermain slot. Selain itu, sebagian besar penjudi internet melakukannya semata-mata untuk kesenangan. Meskipun pelaku mengklaim bahwa itu hanya untuk bersenang-senang, pada kenyataannya, pelaku adalah penjudi biasa. Ini adalah hasil dari penjahat merasa dikalahkan, yang mendorong dorongan mereka untuk sukses dan memberikannya langkah lain. Selain itu, sejumlah besar penjudi online adalah siswa, orang dewasa muda, dan pra-tua (45-59 tahun) menurut data kuesioner yang mereka sediakan.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Taluk Kuantan adalah salah satu hub ekonomi Kuantan Singingi Regency, memungkinkan sejumlah besar pekerja untuk bekerja di sana. Tim Operasi Kepolisian Kuantan Singingi menangkap pria berusia 54 tahun yang dinyatakan bersalah atas kejahatan perjudian ilegal Toto (TOGEL) sekitar pukul 21.00 WIB pada hari Jumat, 8 Desember 2022, di sebuah toko di desa Tobek Panjang, KotoTeluk Kuantan Village, Kuantan Singingi Regency, Riau. Pria itu tidak bergerak dan pergi dengan inisial E.

Kepala Kepolisian Kuansing mengajukan pernyataan resmi kepada wartawan atas nama Kepala Unit Investigasi Kriminal AKP Linter Sihaloho, SH

Rara Zui Andri, dkk.

Judul Naskah Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (Judi Slot) di Kota Taluk Kuantan

MH, menyatakan bahwa Tim Operasional Polisi Kuansin telah berhasil memperoleh bukti dari dua bagian IDR 50.000 denominasi total IDR 100.000, satu ponsel HONOR hitam, satu ATM BNI hitam, dan satu lembar bukti kertas transfertautan total Rp. Menurut Kepala Polisi, sekitar pukul 19.00 WIB pada hari Jumat, 12 Agustus 2022, Tim Operasi Kepolisian Kuansing diberitahu oleh anggota masyarakat bahwa transaksi penjualan Toto Gelap (TOGEL) telah terjadi di sekitar Tobek Panjang Hamlet, Desa Koto Taluk, Distrik Kuantan Tengah.

Tim Operasi Nasional Kepolisian Kuansing diberitahu, dan pada pukul 21.00 mereka langsung menuju lokasi untuk menangkap seorang tersangka, yang diidentifikasi sebagai E alias DY Bin DS, di salah satu stasiun milik saudara FIRA ARIANTO, yang terletak di Tobek Panjang Hamlet, Koto Taluk Village, Kuantan Tengah District, Regency Kuantan Singingi. "Ketika pelaku ditangkap, sebuah unit ponsel ditemukan di tangan pelaku yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian online seperti siejie atau lotere online dan sekitar pukul 21.45 WIT, pelaku bersama dengan bukti di bawah ini dibawa ke Kantor Kepolisian Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Kasat.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kepala polisi nasional, dilaporkan telah memberikan perintah kepolisian regional untuk melarang perjudian di seluruh Indonesia. Memang benar bahwa kepala polisi nasional memberikan perintah kepada kepala polisi regional untuk melarang perjudian online, atau kode 303. Komjen Agus Adrianto, Kepala Bagian Investigasi Kriminal Kantor Polisi Nasional (Bareskrim), menyampaikan instruksi dari Kepala Kepolisian Nasional. Agus mengklaim bahwa polisi secara aktif bekerja untuk menghancurkan perjudian online, terutama bermain slot online.

Sebab, kegiatan itu dinilai meresahkan masyarakat dan meningkatkan kriminalitas. Sudah banyak yang kita ungkap dan tangkap terkait kegiatan judi," kata Agus belum lama ini. Kebebasan untuk mengakses situs judi online hanyalah salah satu alasan yang berkontribusi terhadap kejahatan perjudian online; yang lain adalah kurangnya tindakan oleh penegak hukum untuk memerangi judi online. Karena mereka bermain judi online di kafe internet, penjudi online mengakui dalam data kuesioner bahwa mereka tidak pernah ditanya oleh polisi.

Selain itu, sangat sedikit penjudi online yang pernah melihat larangan yang menyatakan bahwa itu ilegal untuk membuka situs perjudian. Jelas dari ini bahwa penegak hukum belum mengambil masalah yang ditimbulkan oleh kejahatan perjudian internet secara serius. Polisi Taluk Kuantan City Resort belum mengadili kejahatan apa pun yang berkaitan dengan perjudian online, tetapi ini tidak berarti bahwa polisi Kota Tidak melakukan tindakan apapun.

Dalam melaksanakan penanggulangan terhadap tindak perjudian online, Kepolisian Resort Kota Taluk Kuantan akan melakukan tindakan yang sifatnya preventif (pencegahan).⁵

a. Bersifat Preventif

Dalam upaya untuk menghindari pendekatan ini, orang mencoba untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi masyarakat melalui cara yang terintegrasi daripada menggunakan cara-cara ilegal. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi kondisi yang mendorong kejahatan. Kesulitan atau keadaan sosial yang dapat langsung atau tidak langsung mengarah ke kejahatan adalah subjek faktor-faktor yang mempromosikan. Upaya ini berfokus pada pencegahan kejahatan dengan menyingkirkan hal-hal yang mengarah ke kriminal di tempat pertama. Kepolisian Kota Kuantan akan menerapkan langkah-langkah pencegahan berikut sebagai bagian dari tindakan melawan perjudian online ilegal:

1) Menutup Semua Akses Perjudian Online

Menutup semua akses ke situs perjudian online adalah langkah pertama dalam memerangi perjudian internet. Brigadier Mulyandi menyatakan bahwa untuk menutup setiap situs web yang mungkin memiliki konten perjudian di dalamnya, Unit Investigasi Kriminal Hukum akan bekerja dengan beberapa ISP. (Internet Service Providers). Untuk semua kafe internet di Taluk Kuantan City tidak diragukan lagi menggunakan ISP seperti Dashnet, Wanxp, dan Speedy, antara lain.⁶

2) Memberikan Himbauan Melalui Iklan

Memberikan pemberitahuan atau peringatan melalui iklan adalah langkah

⁵ <https://www.berazam.com/read-133782-pasca-intruksi-kapolri-tentang-sikat-habis-judi-online-Kasatreskrim-polres-kuansing-ringkus-pelaku-judi-togel-di-teluk-kuantan.html>

⁶ Ibid

Rara Zui Andri, dkk.

Judul Naskah Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (Judi Slot) di Kota Taluk Kuantan

berikutnya dalam menghentikan perjudian online ilegal. Media sosial, seperti yang kita semua tahu, sekarang sering digunakan sebagai alat untuk pemberitahuan, iklan, dan tujuan lainnya. Polisi Taluk Kuantan City Resort telah menerapkan hukuman larangan bersama dengan hukuman untuk melarang pembukaan situs web yang menyediakan materi perjudian. Selanjutnya, buat flyer atau poster yang akan diposting di kafe internet dan tempat-tempat lain di mana orang dapat menggunakan internet. Penulis mengajukan banding pada 3 April 2014 di markas ISP Wanxp di Jalan Juanda, yang melarang mengunjungi situs web dengan konten pornografi dan berjudi di kafe internet.

3) Dibentuknya Polmas (Polisi masyarakat)

Selain itu, masing-masing subdistrik telah mendirikan Kantibmas (Komunitas Keamanan dan Ketertiban) dan Polmas (Polisi Komunitas) untuk menangani dan mencegah aktivitas kriminal, terutama yang terkait dengan perjudian internet. Untuk menerapkan metode ini, seseorang harus lebih terlibat dalam komunitas dan menyadari aktivitasnya. Selain mempromosikan hubungan yang lebih dalam antara polisi dan masyarakat, ini mencoba untuk menemukan informasi tentang kejahatan yang terjadi di wilayah target dari masyarakat.⁷

4) Melakukan Razia Warung Internet

Tahap terakhir adalah untuk secara berkala melakukan serangan di kafe internet, daripada berkonsentrasi pada satu lokasi yang mencurigakan. Selain itu, ia melarang kafe internet untuk beroperasi sepanjang waktu karena potensi untuk aktivitas kriminal di malam hari. Mengingat bahwa Kota Kuantan Taluk terkenal memiliki ratusan kafe internet, langkah ini tampaknya menantang. Namun, Brigadir Rinto Situmorang mengatakan bahwa mereka akan memastikan bahwa serangan ini di kafe internet terjadi secara teratur.

2. Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Oleh Kepolisian Resort Kota Taluk Kuantan.

Polisi Pekanbaru tidak menangani kejahatan terkait perjudian online. Pada dasarnya, penduduk Kota Taluk Kuantan terus melakukan kejahatan-kejahatan ini sering. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kejahatan perjudian online masih relatif baru dan oleh karena itu polisi Taluk Kuantan City Resort masih memiliki

⁷ Wawancara dengan salah satu kepolisian kuansing pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 10.30

tantangan tertentu dalam menangani kejahatannya. Tantangan-tantangan tersebut termasuk :⁸

a. Kendala Penegak hukum/ Sumber daya manusia

Kepolisian Pekanbaru City Resort sedang mengalami kesulitan untuk mengikuti peningkatan kejahatan siber, terutama dalam bentuk perjudian online. Kegagalan personil penegak hukum dari unit judisila Kepolisian Kuansing – yang menangani kejahatan yang melibatkan ketidakadilan dan perjudian – adalah penyebab mendorong di balik ini. Selain itu, sedikit pejabat penegak hukum di daerah ini memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi, dan banyak lembaga penegakan hukum di wilayah ini masih kekurangan konektivitas internet dan pelatihan teknologi, sehingga sulit bagi petugas untuk memprediksi kenaikan jenis kejahatan ini. Terutama di bidang cybercrime.

Pertimbangan khusus harus diberikan pada jumlah kecil petugas polisi, terutama di bagian pengadilan, yang menangani kasus perjudian di bawah yurisdiksi Kepolisian Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perjudian adalah kejahatan yang semakin umum yang sulit untuk dilawan dalam masyarakat.

Selain keahlian petugas penegak hukum untuk mengenali dan mengevaluasi semakin banyak bukti elektronik sebagai dapat diterima di pengadilan, peraturan yang mengatur sistem bukti yang dapat mengatasi hambatan dan rintangan penegakan hukum juga diperlukan untuk menghancurkan perjudian online, yang merupakan kejahatan siber. atau penghapusan perjudian online ilegal.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kejahatan-kejahatan ini, yang merupakan bagian dari cybercrime, biasanya terhalang dan sulit untuk menemukan bukti untuk membuktikan bahwa tindakan kriminal telah terjadi.

b. Kendala Sarana dan Prasarana

Infrastruktur dan fasilitas menyajikan tantangan bagi penegak hukum. Salah satu masalah fasilitas adalah kurangnya kendaraan operasional kepolisian Kuantan Taluk City Resort, yang membuatnya sulit bagi polisi untuk memantau ratusan kafe internet di Kuantan Singingi Regency. Polisi Taluk Kuantan juga mengalami

⁸ Wawancara pada salah satu kepolisian kuansing pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 11:00

Rara Zui Andri, dkk.

Judul Naskah Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (Judi Slot) di Kota Taluk Kuantan

kesulitan finansial dalam operasi sehari-hari mereka. Selain itu, ada kasus di mana detektif mengunjungi tempat kejahatan atau melakukan patroli menggunakan uang mereka sendiri sebelumnya.

c. Sulitnya mengumpulkan alat bukti dan menangkap pelaku

Pihak berwenang membutuhkan bukti yang memadai untuk membuat penangkapan dalam kasus dugaan pelanggaran perjudian online, sehingga mereka tidak bisa hanya menahan seseorang. Selain itu, karena perjudian online adalah kejahatan terkait komputer, akan sangat sulit untuk mengumpulkan bukti jika komputer perjudian dimatikan. karena seluruh riwayat pelanggar telah dihapus dari memori komputer.⁹

Selain itu untuk menangkap pelaku perjudian juga sangat sulit dilakukan, karena pelaku tidak dapat diketahui secara pasti keberadaannya. Dan akun yang digunakan untuk perjudian juga tidak menggunakan sesuai dengan identitas diri yang sebenarnya.

d. Kendala Kepedulian Masyarakat

Seseorang dapat berpendapat bahwa masih ada sedikit kendali sosial di masyarakat atas prevalensi perjudian internet. Meskipun perjudian ilegal dan terjadi di tempat umum, masih banyak orang yang tidak peduli karena mereka melihatnya seperti biasa. Polisi mengklaim bahwa sejumlah besar orang di bawah yurisdiksi Kepolisian Taluk Kuantan terus tidak menyadari keberadaan perjudian internet ilegal di lingkungan mereka; banyak dari mereka berpura-pura tidak mengetahui karena takut bertemu dengan pihak berwenang.

e. Kendala Dalam Peraturan

Hukum Batas-batas pembatasan hukum, yang menyatakan bahwa Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang saat ini yang mengatur tindakan ilegal perjudian online atau menggunakan sistem elektronik, menunjukkan bagaimana hukum ini berlaku untuk pemain yang bermain judi online. Namun demikian, hukum tersebut menciptakan dualitas dalam persepsi hukum, khususnya dalam hal penentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 45 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi. Sementara menurut Pasal 303 ayat (1) Kode Kriminal, hukuman maksimal untuk pelanggaran hukum ini adalah enam (enam) tahun penjara dan/atau denda

⁹ Wawancara dengan salah satu kepolisian kuansing pada tanggal 30 Mei 2024 Pukul 12:00

sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)¹⁰, menurut Pasalnya, menurut Pasar 45 ayat (1) Undang-Undang, ancaman penjara maksimum adalah sepuluh tahun atau denda maksimum Rp.25.000.000.00 (Twenty-five million rupiah).

Ini jelas membuat lebih sulit bagi otoritas hukum untuk mengejar mereka yang terlibat dalam perjudian online ilegal. Selain itu, menurut Pasal 43 ayat (3) dan (6) Undang-Undang ITE, pencarian dan penangkapan bukti yang digunakan dalam kegiatan kejahatan yang melibatkan perjudian elektronik diizinkan asalkan disetujui oleh Ketua Pengadilan Daerah setempat dan harus diselesaikan dalam waktu 24 jam. Ini sulit untuk dipahami karena surat otorisasi dari ketua pengadilan daerah tidak dapat diperoleh dalam waktu yang begitu singkat. Orang hanya membahas rasa keadilan ketika kasus muncul untuk diskusi dan / atau debat di dalam masyarakat; mereka tidak memperhitungkan konsekuensi dari hukum yang mengikuti.

Untuk menekan dan bahkan sepenuhnya memusnahkan tindakan perjudian ilegal, yang timbul dari kurangnya pendidikan dan ekonomi lokal yang lemah, masyarakat harus dibawa lebih dekat ke pendidikan hukum dan negara harus benar-benar menghapus kemiskinan.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian

Khususnya di kota rute Kuantan Taluk, Taluk Kuantan City Resort mengatasi rintangan untuk penegakan hukum kejahatan perjudian online di Kuantan Singingi Regency. Sebagai bagian dari kampanye untuk mengakhiri perjudian internet, pencegahan dilakukan sebelum perjudian terjadi. Meskipun demikian, masih belum sepenuhnya dihilangkan. Namun, perjudian online masih digunakan untuk mencegah, membatasi, atau mengurangi kerusakan lingkungan. Berdasarkan wawancara penulis, Brigadier Hotman Maringan membahas langkah-langkah pencegahan yang dapat digunakan sebelum pelanggaran perjudian online dilakukan. Tindakan pencegahan diimplementasikan dalam beberapa cara, tergantung pada temuan wawancara,

¹⁰ Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

termasuk:¹¹

a. Mengadakan Pelatihan Khusus Bagi Polisi dibidang Teknologi

Dalam hal ini, melakukan seminar untuk polisi di Kuantan Taluk City Resort Police sebagai bagian dari Dikjur (vocational education). Latihan Dikjur ini dilakukan di SPN Kuansing. Mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan pengalaman di bidang kompetensi hukum adalah tujuan dari kegiatan ini. Ini akan mengundang sumber daya orang-orang dengan pengalaman hukum dan kejahatan siber - misalnya, para ahli dari Kantor Kepolisian Nasional yang mengkhususkan diri dalam teknologi dan cybercrime - untuk menawarkan pelatihan dan keahlian tentang kegiatan ilegal tertentu, terutama perjudian online, yang mungkin sulit ditemukan. Karena, pada dasarnya, pelatihan untuk petugas polisi hanya berlangsung enam bulan hingga satu tahun sebelum mereka disetujui untuk bergabung dengan pasukan.

Namun menurut Briptu Hotman Maringan hal itu belumlah cukup karena selama pendidikan tersebut lebih mengarah pada kegiatan fisik dan mental polisi yang baru, sehingga diperlukan tambahan pendidikan khusus.

b. Melengkapi Sarana dan Prasarana

Kepolisian Kota Taluk Kuantan mengklaim bahwa ketidakmampuan untuk memeriksa kafe internet secara efektif karena kekurangan kendaraan membuat perlu untuk membeli lebih banyak kendaraan untuk patroli fasilitas. Mengingat bahwa Kota Teluk Kuantan adalah rumah bagi ratusan kafe internet.¹²

c. Membentuk Tim untuk Memata-matai

Lokasi di mana akses ke perjudian internet adalah umum. Tahap ini diimplementasikan dengan mengumpulkan tim yang tanggung jawab utamanya adalah untuk mengawasi aktivitas perjudian online, terutama di kafe internet di mana jumlah besar transaksi perjudian ilegal online yang dicurigai terjadi. Untuk menemukan penjahat dan penjudi online, kru ini berubah menjadi unit

¹¹ Wawancara dengan salah satu kepolisian kuansing pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 13:00

¹² Wawancara dengan Salah satu Kepolisian Kuansing Pada tanggal 30 Mei 2024 Pukul 13:30

pengawasan polisi.¹³

d. Memberikan Penyuluhan Hukum

Karena masih ada kekurangan pengetahuan tentang hukum di masyarakat umum, sangat penting untuk menyebarkannya untuk mempromosikan sikap dan perilaku yang mematuhi hukum dan memastikan bahwa setiap orang menyadari dan menghormati hak dan kewajiban individu dan kolektif mereka. Outreach adalah salah satu dari banyak strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengurangi kriminalitas dan kejahatan yang terkait dengan perjudian, saran ini dapat mengambil bentuk mendidik masyarakat tentang hukum dan menawarkan bimbingan atau informasi. Tanggung jawab bersama untuk perjudian adalah topik lain yang dibahas dalam pendidikan kesadaran.

e. Merevisi Undang-undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur ITE, Pasal 303, dan Pasal 303 bis adalah undang-undang dan peraturan yang berlaku yang mengawal perjudian. Oleh karena itu, reformasi diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak memberlakukan dualitas hukum pada mereka yang melakukan pelanggaran yang melibatkan perjudian online sambil mengenakan hukuman. Selain itu, Pasal 43 ayat (3) dan (6) Undang-Undang ITE, yang menetapkan bahwa pencarian, penangkapan, dan/atas penahanan sistem elektronik harus diizinkan oleh Ketua Pengadilan Daerah setempat dalam waktu satu jam tengah malam, juga harus diubah. Ini membuatnya sulit bagi kami untuk melacak bukti dan orang-orang yang terlibat dalam perjudian online.

C. PENUTUP

Temuan dan rekomendasi berikut dapat dibuat berdasarkan hasil dan diskusi yang telah diberikan.

- 1) Polisi, khususnya Kepolisian Buleleng, sedang melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan, melakukan investigasi mendalam terhadap tersangka pelanggar, mengajukan kasus, dan mengirimkan tersangka dan dokumentasi pendukung ke jaksa untuk menegakkan hukum terhadap tindakan ilegal perjudian online.

¹³ Wawancara dengan salah satu kepolisian kuansing Pada tanggal 30 Mei 2024 Pukul 14:00

Rara Zui Andri, dkk.

Judul Naskah Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (Judi Slot) di Kota Taluk Kuantan

- 2) Kendala-kendala yang dialami kepolisian resort Buleleng dalam penegakan hukum, kendala yang pertama ialah sulitnya mendapatkan alamat tersangka, tingginya penguasaan pelaku dalam mengoperasikan teknologi informasi yang dimana akses internet yang melayani situs-situs slot online sangat mudah dan prinsip kerahasiaan bank untuk tidak memberikan identitas nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Farid, Zainal (2007). Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika).
- Atmasasmita, Romli (2005). Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. (Bandung.PT Refika Aditama)
- Katono, Kartini. (2005). Patologi Sosial jilid 1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Marpaung. Leden. (2005). Asas Teori Praktik Hukum Pidana. (Jakarta:Sinar Grafika) Jakarta.
- Moeljatno.(1993. Asus Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineke Cipta).
- Puracaraka, Purnadi. (1997). Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Bandung: Pembangunan, Alumni).
- Simandjuntak, B. (1980). Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. (Bandung: Tarsito).
- Soekanto, Soerjono. (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Waluyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum dan Praktek. (Jakarta: Sinar Grafika).

Website

- <https://www.berazam.com/read-133782-pascaintruksi-kapolri-tentang-sikat-habis-judi-online-kasatreskrim-polres-kuansing-ringkus-pelaku-judi-togel-di-teluk-kuantan.html>. diakses tanggal 5 juni 2024.
- <http://anjarnawanyep.wordpress.com>- konsep-restorative-justice, tentang fakta-fakta sosial di masyarakat, diakses melaluiinternet pada tanggal 5 Juni 2024.

Sumber Lain

- Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Wawancara dengan salah satu kepolisian kuansing Pada tanggal 30 Mei 2024.